

## **BAB III**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

---

Memenuhi tanggung jawab implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka selama Tahun 2023 Pemerintah Kota Medan pada prinsipnya menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pokok yang dikelompokkan ke dalam :

- (A) Urusan Konkuren
- (B) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan
- (C) Urusan Pemerintahan Umum

Bila diamati lebih jauh maka, sebahagian besar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama Tahun 2023 merupakan tugas berdasarkan azas desentralisasi. Tugas atau urusan konkuren tersebut secara umum dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) urusan pemerintahan wajib, dan (2) urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) dan yang bukan pelayanan dasar (*non basic services*) bagi masyarakat. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah berdasarkan nilai kompetitif dan komparatif yang dimiliki.

Secara fungsional, urusan Konkuren, urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan yang berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan selama Tahun 2023, terdiri dari:

1. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yang meliputi:*
  - 1.1. Urusan Pendidikan
  - 1.2. Urusan Kesehatan
  - 1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - 1.5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
  - 1.6. Urusan Sosial
2. *Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yang meliputi:*
  - 2.1. Urusan Tenaga Kerja

- 2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 2.3. Urusan Ketahanan Pangan
  - 2.4. Urusan Lingkungan Hidup
  - 2.5. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
  - 2.6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - 2.7. Urusan Perhubungan
  - 2.8. Urusan Komunikasi dan Informatika
  - 2.9. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - 2.10. Urusan Penanaman Modal
  - 2.11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
  - 2.12. Urusan Kebudayaan
  - 2.13. Urusan Perpustakaan
3. *Urusan Pemerintahan Pilihan*
- 3.1. Urusan Pariwisata
  - 3.2. Urusan Pertanian
  - 3.3. Urusan Perdagangan
  - 3.4. Urusan Perindustrian
4. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang*
- 4.1. Urusan Administrasi Pemerintahan
  - 4.2. Urusan Pengawasan
  - 4.3. Urusan Perencanaan
  - 4.4. Urusan Keuangan
  - 4.5. Urusan Kepegawaian, dan
  - 4.6. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari

pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal pada Tabel 3.1. sebagai berikut.

Tabel 3.1. Nilai Capaian Kinerja

No	Nilai	Pencapaian
[1]	[2]	[3]
	85 s/d 100	Sangat tercapai/Sangat berhasil
	70 s/d < 85	Tercapai/Berhasil
	55 s/d < 70	Cukup tercapai/Cukup berhasil
	0 s/d < 55	Kurang tercapai/Kurang berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### 3.1. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan memuat :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Selanjutnya berdasarkan implementasi pelaksanaannya, maka capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib, pilihan dan fungsi penunjang selama Tahun 2023, khususnya capaian kinerja program dan kegiatan tersebut di atas dituangkan dengan menggunakan tabel.

## A.2.8 Urusan Komunikasi dan Informatika

### A.2.8.1 Dinas Komunikasi dan Informatika

#### A.2.8.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
18	Komunikasi dan Informasi	Dinas Kominfo Kota Medan		1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	93%	93%	Dibutuhkan kreativitas yang lebih memancing minat masyarakat dalam beriterasi terhadap informasi yang disampaikan Pemerintah Kota Medan	Melakukan berbagai metode penyampaian berita yang memancing minat masyarakat untuk berinteraksi secara aktif	-
				1.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	94%	94%	Dibutuhkan kreativitas yang lebih memancing minat masyarakat dalam beriterasi terhadap informasi yang disampaikan Pemerintah Kota Medan	Melakukan berbagai metode penyampaian berita yang memancing minat masyarakat untuk berinteraksi secara aktif	-
				1.1.1 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	4 Dokumen	Penyampaian Informasi yang dilakukan belum mempengaruhi minat masyarakat secara maksimal	Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui spanduk dan baliho pada titik strategis yang dapat menarik minat masyarakat sehingga informasi dapat tersampaiakn kepada masyarakat	-
				1.1.2 Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	Karena dari 4 ID <i>Zoom Meeting</i> yang eksis, ada 1 ID yang tidak digunakan (ID Medan Pemko, ID Diskominfo Server, ID Diskominfo Kota Medan dan ID Command Center Medan tidak digunakan )	Untuk selanjutnya penggunaan anggaran ID Command Center tidak diajukan lagi, karena ID Command Center tidak digunakan untuk <i>zoom meeting</i> .	-
				1.1.3 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	50 Orang	49 Orang	Masih kurangnya pembinaan terhadap sumber daya komunikasi publik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat	Diharapkan adanya pembinaan berupa sosialisasi kepada sumber daya komunikasi publik sehingga diharapkan dapat menyampaikan informasi terkait kegiatan Pemko Medan kepada masyarakat	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.4 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	3 Dokumen	3 Dokumen	Dalam melaksanakan penyebaran informasi melalui media cetak, media online dan media elektronik, banyak kegiatan yang bersifat insidental sehingga dalam pelaksanaan banyak dilakukan perubahan jadwal dari yang sudah direncanakan	Dilaksanakan pergeseran pelaksanaan kegiatan	-
			SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan No.473.4.41/Kominfo/024 Tahun 2022 dan SK Kepala Dinas Komunikasi dan	1.1.5 Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	Target unit tercapai, namun adanya Nilai Kontrak yang Harga Negosiasinya lebih rendah dari DPA, selain itu perlunya upaya penambahan/terpenuhinya sarana dan prasaran dalam peningkatan transformasi digital	Peningkatan aplikasi yang terintegrasi/berbagi pakai	-
			Perwal No. 28 Tahun 2018 ttg Smart City Kota	2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100%	100%	Upaya penambahan/terpenuhinya sarana dan prasaran dalam peningkatan transformasi digital yang lebih banyak	Peningkatan aplikasi yang terintegrasi/berbagi pakai	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Upaya penambahan/terpenuhinya sarana dan prasarana dalam peningkatan transformasi digital yang lebih banyak	Peningkatan aplikasi yang terintegrasi/berbagi pakai	-
				2.1.1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	232 Unit menuju 1029 Unit	1029 Unit	Adanya Nilai Kontrak yang Harga Negosiasinya lebih rendah dari DPA dan adanya efisiensi anggaran untuk pelaksanaan Pemeliharaan. Ada Kegiatan PAPBD ( Pengembangan Jaringan) yang tidak dapat direalisasikan karena Adanya Penghematan Anggaran	Dilaksanakan perubahan anggaran demi terlaksananya kegiatan yang diharapkan	-
				2.2 Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Upaya penambahan/terpenuhinya sarana dan prasarana dalam peningkatan transformasi digital yang lebih banyak	Peningkatan aplikasi yang terintegrasi/berbagi pakai	-
				2.2.1 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen	1 dokumen	Penyusunan dokumen RITIK dan Peta Rencana yang melibatkan seluruh OPD dalam pengumpulan data dukung dan sosialisasi tentang SPBE belum Optimal	Melaksanakan sosialisasi tentang penerapan layanan SPBE ke masing-masing OPD dan pengumpulan data dukung untuk mencapai peningkatan nilai SPBE Pemko Medan	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	Terdapat perbedaan dari kode barang yang akan diadakan, sehingga diperlukan waktu untuk melakukan konsolidasi pada aplikasi SIRUP	Dilakukan konsolidasi pada aplikasi SIRUP	-
				2.2.3 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Terdapat kenaikan harga pada beberapa barang, sehingga tidak dapat dilakukan pengadaan sesuai waktu yang direncanakan	Telah dilakukan penambahan pada perubahan anggaran tahun 2023	-
				2.2.4 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Unit Aplikasi	1 Unit Aplikasi	Perlunya Penambahan tenaga programmer dalam mengembangkan aplikasi untuk mewujudkan medan menjadi kota yang smart city	Memaksimalkan tenaga programmer yang ada dalam pengembangan aplikasi untuk mendukung mewujudkan medan menjadi kota yang smart city	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	100%	Pelaksanaan program ini masih membutuhkan kuantitas sumber daya manusia, dalam urusan data dan Statistik Sektoral, lebih banyak dari yang ada saat ini baik yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika maupun pada Perangkat Daerah lain yang terkait. Hal ini diharapkan dapat mendukung koordinasi dalam mengomunikasikan data antar unit kerja. Selain itu, kompetensi SDM yang mendukung kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini juga perlu mendapat	Perlu menambah sumber daya manusia yang menjadi pilar penyediaan data sektoral dan memiliki kompetensi yang baik pada bidangnya. Selain itu, perlu untuk memperkuat koordinasi antara unit kerja sebagai bentuk komunikasi dalam penyediaan data.	-
				3.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Pelaksanaan program ini masih membutuhkan kuantitas sumber daya manusia, dalam urusan data dan Statistik Sektoral, lebih banyak dari yang ada saat ini baik yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika maupun pada Perangkat Daerah lain yang terkait. Hal ini diharapkan dapat mendukung koordinasi dalam mengomunikasikan data antar unit kerja. Selain itu, kompetensi SDM yang mendukung kegiatan Penyelenggaraan Statistik	Perlu menambah sumber daya manusia yang menjadi pilar penyediaan data sektoral dan memiliki kompetensi yang baik pada bidangnya. Selain itu, perlu untuk memperkuat koordinasi antara unit kerja sebagai bentuk komunikasi dalam penyediaan data.	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen			-
				3.1.2 Membangun Metadata Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen			-
				3.1.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	75 Orang	75 Orang			-
				3.1.4 Pengembangan Infrastruktur	5 Unit	5 Unit			-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1.5 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			-
				4 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	61%	61 %	Kurangnya pelatihan pengamanan Persandian dan peralatan persandian yang mutakhir untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan persandian	Menambah pelatihan untuk personil SDM dan peralatan persandian sesuai dengan perkembangan zaman	-
				4.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/kota	61%	61 %	Kurangnya pelatihan pengamanan Persandian dan peralatan persandian yang mutakhir untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan persandian	Menambah pelatihan untuk personil SDM dan peralatan persandian sesuai dengan perkembangan zaman	-
				4.1.1 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Adanya perbedaan harga dalam proses pengadaan, dimana harga barang lebih rendah dari yang diajukan.	Dilakukan penyesuaian harga sesuai yang tersedia di lapangan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50 OPD	50 OPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terlaksananya Pengamanan sinyal/jamming</li> <li>- Masih kurangnya kesadaran keamanan para ASN terhadap keamanan informasi</li> <li>- Adanya gangguan terhadap PHKS (Pola Hubungan Komunikasi Sandi)</li> <li>- Adanya gangguan terhadap website / aplikasi Pemko Medan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak adanya permintaan untuk melakukan pengamanan sinyal</li> <li>- Melaksanakan penambahan kegiatan kontra penginderaan di OPD-OPD di Pemko Medan</li> <li>- Telah dilakukan upaya setting ulang perangkat HT dan pengecekan sebab gangguan</li> <li>- Melaksanakan penetrasi test terhadap website/aplikasi milik Pemko Medan yang mengalami gangguan</li> </ul>	
				4.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	61%	61%	Sering terjadi kendala gangguan komunikasi yang disebabkan karna faktor alam, faktor manusia, dan usia perangkat alat komunikasi yang digunakan	Melakukan pergantian alat komunikasi, melakukan pemeliharaan untuk alat komunikasi yang masih bisa diperbaiki	
				4.2.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	Sering terjadi kendala gangguan komunikasi yang disebabkan karna faktor alam, faktor manusia, dan usia perangkat alat komunikasi yang digunakan	Melakukan pergantian alat komunikasi, melakukan pemeliharaan untuk alat komunikasi yang masih bisa diperbaiki	

## 1.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

### A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

- **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2023, realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah seperti tercantum pada tabel sebagai berikut:

**Tabel Target dan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
						Persen	Ordinal	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Layanan Publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Indeks Transformasi Data Digital	Indeks	0,93	0,94	101%	101	Sangat Berhasil
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Kriteria	Informatif	Informatif	100%	100	Sangat Berhasil
2	Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan	Persentase	100%	100%	100%	100	Sangat Berhasil

	melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai	terintegrasi							
		Indeks SPBE	Indeks	2,76	2,77	100,4%	100,4		Sangat Berhasil
3	Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga dengan Baik	Persentase	68%	70%	103%	103		Sangat Berhasil
		<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>100,9%</b>			Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 5 target indikator kinerja, diperoleh hasil 5 indikator memperoleh capaian Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebesar 100% dapat dikategorikan “*Sangat Berhasil*” pada tahun 2023.

Pengukuran capaian kinerja diatas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata – rata keberhasilan sebesar 100,9 % pada tahun 2023.

### **1.1.3 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja Adala Sebagai Berikut Ini:**

- A. Sasaran Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **Indikator Kinerja Indeks Transformasi Data Digital dengan capaian sebesar 0,94%**

Indeks Transformasi Data Digital hasil dari pembagian antara jumlah data digitalisasi dibagi dengan jumlah data yang berpotensi terdigitalisasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau :

$$\text{Indeks Transformasi Data Digital} = \frac{\text{Jumlah Data Digitalisasi}}{\text{Jumlah Data yang Berpotensi terdigitalisasi pada OPD}}$$

Indeks Transformasi Data Digital untuk pelaksanaan tahun 2023 mengalami peningkatan dari target Perjanjian Kinerja di dinas, dimana target perjanjian kinerja 0,93 sedangkan realisasi yang diperoleh 0,94 dengan capaian realisasi sekitar 101%. Hal ini dikarenakan Jumlah Data Digitalisasi mengalami penambahan dari 446 pada tahun 2022 menjadi 452 pada tahun 2024.

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Transformasi Data Digital	446/480=0,93	452/480=0,94	101%

Indeks Transformasi Data Digital mencapai nilai 0,94 pada tahun 2023. Angka ini melebihi target yang telah ditentukan. Ketercapaian ini disebabkan oleh pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan melalui koordinasi langsung dengan Produsen Data. Produsen Data juga memiliki atensi yang baik terhadap kebutuhan data saat ini. Namun, masih ada kendala yang harus dihadapi oleh Dinas Kominfo sebagai Wali Data yaitu kualitas data yang perlu mendapatkan perhatian seperti metadata. Selain itu, untuk perolehan data ini juga masih memerlukan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman baik tentang data sektoral.

Pencapaian target indikator sasaran ini diperoleh melalui pelaksanaan **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** dengan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota melalui 5 (empat) sub kegiatan utama yaitu :

- a. **Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan/pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral** tercapai 100% yaitu penyediaan layanan Aplikasi *Geographic Information System* (GIS) yaitu Sistem Informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis.
- b. **Membangun metadata statistik sektoral** yaitu pelaksanaan Bimbingan Teknis Membangun Metadata Statistik. Metadata Statistik merupakan publikasi yang menyajikan beragam jenis data statistik yang bersumber dari organisasi Perangkat Daerah Pemerintah. Bimtek ini mengajarkan cara pengumpulan data, komponen utama kegiatan, cakupan wilayah dan periode pelaksanaan. Capaian kinerja adalah 1 Dokumen sehingga tercapai 100% sesuai target.
- c. **Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral** yaitu pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengembangan Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan

tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagikan antar-instansi pusat serta daerah di Indonesia. Target yang ingin dicapai adalah untuk 75 orang yang memahami tentang Satu Data Indonesia, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

- d. **Pengembangan Infrastruktur** tercapai 100% yaitu penyediaan layanan crawling data integrasi yaitu layanan aplikasi system satu data (pembangunan system input data satu data) dan penyediaan software analisa visualisasi data berupa dashboard integrasi.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota serta relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

**B. Sasaran Nilai Keterbukaan Publik dengan Target Informatif.**

Pada Tahun 2023 Nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk layanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan masuk dalam kategori Informatif, artinya pesan atau info yang disampaikan bersifat apa adanya, sesungguhnya, sesuai fakta dan dengan data-data dan pendapat yang benar. Keterbukaan Informasi Publik yang mendapat penilaian dari Komisi Informasi Publik Sumatera Utara menitikberatkan pada pelaksanaan permintaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID Utama melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi sumber data dari informasi yang diinginkan oleh masyarakat/lembaga tertentu. Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga mampu melakukan penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan media sosial terutama terkait dengan pembangunan kota.

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100%

Pencapaian target indikator sasaran ini diperoleh melalui pelaksanaan **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** dengan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota melalui 3 (tiga) sub kegiatan utama yaitu

1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik yaitu penyampaian informasi publik melalui penggunaan media *Backdrop*, baliho, spanduk dan penyampaian menggunakan mobil siaran keliling.
2. Pelayanan Informasi Publik yaitu penggunaan media call center 112. Jenis pengaduan kejadian darurat yang dilayani (*Call Center*) 112, seperti: kebakaran, medis/ambulans, kecelakaan, masalah ketertiban dan keamanan, dan jenis kejadian darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan, dan layanan *Zoom Meeting* Pemerintah Kota Medan.
3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas yaitu hubungan kerja dan koordinasi dengan media massa dan lembaga kehumasan dalam penyampaian komunikasi dan informasi publik di Pemerintah Daerah Kota Medan yaitu :
  - Media Online. Penggunaan media online skala lokal sebanyak 118 Media dan media skala nasional sebanyak 10 (sepuluh) media yaitu suara.com, jawapos.com, okezone.com, sindonews.com. CNBCIndonesia.com. merdeka.com, detik.com, antaranews.com. kompas.com dan CNNIndonesia.com.
  - Media Cetak. Penggunaan media cetak harian dan mingguan.
  - Media Elektronik yaitu Radio dan Televisi. Radio yang digunakan terdiri dari 8 (delapan) radio swasta yaitu Citrabuana, Voks, Suara Medan, Sonora, Smart FM, Most FM, Aqila FM dan Elshinta dan 1(satu) radio RRI, sedangkan televisi terdiri dari 4 (empat) stasiun swasta yaitu Inews TV, Kompas TV, CNN dan TV One dan 1 (satu) televisi pemerintah (TVRI)

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** serta relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

- C. **Sasaran Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai dengan Nilai Indikator Kinerja berupa :**

**Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan/atau terintegrasi.**

Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi merupakan hasil pembagian antara jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi dibagi dengan jumlah layanan publik secara online yang tersedia dikali seratus persen atau :

Persentase layanan publik Yg diselenggarakan secara Online dan atau terintegrasi	$= \frac{\text{Jumlah layanan publik yg diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik secara Online yang Tersedia}} \times 100\%$
--	---

Capaian Kinerja tahun 2023 yang diperoleh untuk sasaran strategis diatas adalah tersedianya 26 aplikasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target 100 persen layanan dapat dipelihara dengan baik. Pada Indikator ini menunjukkan adanya layanan publik yang dapat berbagi pakai atau terintegrasi demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Pemerintah Kota Medan dan masyarakat. Layanan publik yg terintegrasi secara online adalah semua layanan aplikasi yg dikembangkan oleh Pemko Medan untuk mendukung layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan memberikan kepuasan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Terdapat 26 layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi yaitu : SIMP4D, SIMPEG, SIBISA, SARANA, SABER PUNGLI, JDIH, SIDUTA, SIPANDU, SMART-WAN, GEOPORTAL, PPDB ONLINE, WBS, KEDAN, MERCY, CCTV KOTA MEDAN, SIMETAKERJA, SIMPANG, SIGA, E-HASIL PENELITIAN, DASHBOARD EKSEKUTIF, PORTAL SATU DATA, S-KETBRIDA, E-DEVPLAN, SIDIK, SIPOLAN, dan SIAP KOTA MEDAN

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	26/26*100%= 100%	26/26*100%= 100%	100%

Data Layanan Publik diharapkan dengan adanya aplikasi yang baik, dapat membantu meningkatkan pelayanan informasi di Pemerintahan Kota Medan untuk masyarakat. Selain itu juga dapat meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan informasi dalam rangka penerapan e-government. Berikut disampaikan tabel Layanan Publik yang Terintegrasi dan Layanan Publik yang Online di Pemerintah Kota Medan.

**Tabel Aplikasi Layanan Publik online dan Terintegrasi Pemerintah Kota Medan**

<b>No.</b>	<b>SKPD PENGELOLA</b>	<b>SKPD TERINTEGRASI</b>	<b>NAMA APLIKASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RERTIBUSI DAERAH	BPKAD	SIMP4D	Integrasi dengan aplikasi Bank SUMUT, BNI, Mercy Kota Medan serta aplikasi SIPANDU Kota Medan pada Dinas PMPTSP untuk system online dan flagging pembayaran pajak daerah
2	BKDPSDM KOTA MEDAN	DINAS KOMINFO	SIMPEG	Integrasi data SIMPEG dengan Aplikasi SARANA, WBS, KeDan, dan Dashboard Eksecutive untuk informasi data kepegawaian Kota Medan
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SIBISA	Integrasi data aplikasi Saber Pungli, SIDUTA, PPDB Online, TTE dan Mercy Kota Medan untuk data administrasi penduduk Kota Medan
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	BKDPSDM	SARANA	Integrasi dengan Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Pegawai) dan TTE
5	INSPEKTORAT KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN	SABER PUNGLI	Integrasi data administrasi kependudukan pada Disdukcapil dan Mercy Kota Medan
6	BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MEDAN	SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN	JDIH	Integrasi dengan aplikasi Smartwan untuk data peraturan dan perundang-undangan Kota Medan pada Bagian Hukum Setda Kota Medan
7	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	SIDUTA	Integrasi dengan Mercy Kota Medan dan data administrasi kependudukan pada aplikasi SIBISA untuk pencarian lowongan pekerjaan

				berdasarkan NIK warga Kota Medan
8	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BADAN PENGELOLAAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH	SIPANDU	Integrasi dengan aplikasi SIBISA, SIMP4D, TTE, dan Mercy Kota Medan
9	SEKRETARIS DEWAN KOTA MEDAN	BAGIAN HUKUM KOTA MEDAN	SMART-WAN	Integrasi dengan Mercy Kota Medan untuk system informasi manajemen perkantoran terpadu dan media dewan yang merupakan inovasi berbasis teknologi informasi dan non teknologi dari masing-masing unit kerja pada Sekretariat DPRD Kota Medan yang sudah terintegrasi dengan TTE
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	BAPPEDA KOTA MEDAN	GEOPORTAL	Integrasi dengan Portal Satu Data untuk Media penyimpanan dan penyebarluasan informasi geospasial Kota Medan yang dapat diakses melalui internet/online
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN	PPDB ONLINE	Integrasi dengan data administrasi kependudukan pada aplikasi SIBISA untuk Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara online tingkat SLTP Kota Medan
12	INSPEKTORAT KOTA MEDAN	BKDPSDM KOTA MEDAN	WBS	Integrasi dengan Mercy Kota Medan dan data Kepegawaian Kota Medan pada aplikasi SIMPEG untuk pelaporan atau pengaduan tindak pidana tertentu yang melibatkan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Medan

13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	BKDPSDM KOTA MEDAN	KEDAN (MARKET PLACE KEDAI MEDAN)	Aplikasi untuk pelaku UMKM menawarkan produknya kepada Pegawai Pemerintah Kota Medan atau wadah Pegawai Pemerintah Kota Medan untuk melihat produk UMKM yang ada di Kota Medan
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	DISDUKCATPIL, DINAS PMPTSP, DINAS PERHUBUNGAN	MERCY (APLIKASI MEDAN SMART CITY)	Aplikasi untuk portal satu layanan untuk mengakses semua pelayanan publik secara online dan terintegrasi di Kota Medan.
15	DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN, COMMAND CENTER KOTA MEDAN	CCTV KOTA MEDAN	Integrasi dengan Mercy Kota Medan untuk pemantauan langsung kondisi wilayah Kota Medan melalui CCTV (Pengendalian lalu lintas dan kondisi keamanan berbasis teknologi informasi) secara online dan terintegrasi
16	BAGIAN KERJASAMA SETDA KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KOTA MEDAN	SIMETAKERJA	Integrasi dengan Mercy Kota Medan untuk pemetaan kerja sama yang memudahkan serta mengetahui setiap perkembangan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota
17	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	SIMPANG	Integrasi dengan Mercy Kota Medan untuk Sistem Informasi dan Manajemen Pangan yang berisi tentang daftar harga dan distributor di Kota Medan
18	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	SIGA (SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK)	Integrasi dengan Dashboard Eksekutif untuk Sistem Informasi Gender dan Anak yang berisi informasi tentang data Gender dan Anak di Kota Medan

	MEDAN			
19	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	E-HASIL PENELITIAN	Integrasi dengan portal E-Brida untuk Wadah atau portal untuk melihat hasil-hasil penelitian dan jurnal yang dilakukan oleh Brida Pemko Medan.
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN		DASHBOARD EKSEKUTIF	Integrasi dengan layanan Portal Satu Data yang dirancang khusus untuk system informasi kebutuhan pimpinan dalam pengawasan/monitoring dan updating informasi serta making decision (keputusan)
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN		PORTAL SATU DATA	Integrasi dengan Mercy Kota Medan dan Dashboard Eksekutif untuk tata kelola data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi
22	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	S-KETBRIDA	Integrasi dengan Potral E-BRIDA untuk Sistem Informasi untuk surat keterangan penelitian, magang, PKL, dan lainnya yang dikeluarkan oleh Brida Pemko Medan
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	E-DEVPLAN	Integrasi dengan aplikasi perencanaan pusat SIPD untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Kota Medan
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	SIDIK	Sistem Informasi Pendidikan yang merupakan Aplikasi pengumpulan data tahunan berkaitan dengan data TK/RA, SD dan SMP di Kota Medan
25	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	SIPOLAN	Integrasi dengan aplikasi perencanaan pusat SIPD untuk Pelaporan Realisasi Fisik dan Anggaran serta memudahkan penyusunan laporan dengan cepat, tepat, dan akurat

26	KECAMATAN KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	SIAP KOTA MEDAN	Sistem Administrasi Layanan Kecamatan dan Kelurahan Kota Medan
----	----------------------	---	--------------------	--

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

**Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika** dengan capaian sebesar 100%. Terdapat 2 kegiatan yaitu pertama **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan capaian kinerja sebesar 100% , dengan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu 1) **Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah** dengan target 1029 unit dari seluruh OPD Pemko Medan dalam penyebaran jaringan akses internet sehingga layanan publik dan layanan pemerintah dapat terselenggara dengan baik dengan capaian kinerja sebesar 100%

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** serta relative *“sudah sesuai”* dengan target kinerja **Program Aplikasi dan Informatika** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Untuk kegiatan kedua adalah **Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan capaian kinerja sebesar 100%, dengan didukung oleh 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu 1) **Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik** dengan target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen, sehingga capaian 100% 2) **Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah** dengan target 1 unit untuk mendukung penggunaan Data Center Pemko Medan, dimana dalam data center berfungsi untuk penyimpanan data data dari seluruh OPD di Pemerintah Kota Medan sehingga capaian kinerja sebesar 100%, 3) **Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah** dengan target 3 dokumen terkait sistem keamanan data center, capaian kinerja sebesar 100% dan 4) **Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik** dimana terealisasi sebanyak 1 aplikasi sehingga capaian sebesar 100%. Dengan adanya dukungan dari kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan sub kegiatan ini, sehingga dapat menunjukkan adanya layanan publik yang dapat berbagipakai atau terintegrasi demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Pemerintah Kota Medan serta dapat mengembangkan layanan publik yang dapat diselenggarakan

secara online dan terintegrasi dimana dari 26 layanan yang targetkan, pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 26 layanan, sehingga tercapai 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan **Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** serta relative *“sudah sesuai”* dengan target kinerja **Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.





#### **D. Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).**

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi pusat maupun pemerintah daerah, yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan berbasis elektronik. Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk meningkatkan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Medan, pada Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan pada **sub kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik** dan tercapai 100% dari yang diharapkan. Rencana Induk SPBE ini bertujuan untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mewujudkan rancangan dalam integrasi dan interoperabilitas data dan system informasi di lingkungan Pemerintah Daerah sekaligus memberikan arahan dalam menentukan strategi SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Pemerintahan Kota Medan.

Untuk Tahun 2023, Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) naik 0,01, menjadi 2,77 dari 2,76 pada Tahun 2022. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperoleh berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap peningkatan pelaksanaan kegiatan SPBE di Pemerintah Kota Medan.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan **Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** serta relative *“sudah sesuai”* dengan target kinerja **Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

**E. Sasaran Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik** yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dalam disampaikan sebagai berikut:  
**Indikator Kinerja Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan/atau terjaga dengan baik.**

Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik merupakan pembagian antara jumlah layanan informasi yang terlindungi dan terjaga dengan baik dibagi

dengan jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan informasi dikali seratus persen atau :

$$\text{Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga dengan Baik} = \frac{\text{Jumlah Layanan Informasi yang terlindungi \& Terjaga dengan Baik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Informasi}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja tahun 2023 yang diperoleh untuk sasaran strategis diatas adalah tersedianya layanan informasi pemerintah daerah untuk 35 jumlah layanan informasi yang terlindungi dan terjaga dengan baik. Untuk Tahun Anggaran 2023 persen realisasi yang dicapai melebihi target Perjanjian Kinerja dinas, dimana target yang ditetapkan 68 persen sedangkan realisasi 70 persen atau naik 2 persen.

IKU	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	34/50*100%=68%	35/50*100%=70%	103%

Ada 2 (dua) jenis kategori layanan kegiatan yang dilakukan yaitu :

1. Kontra Penginderaan, Jamming, Monitoring Alat Komunikasi
2. Tanda Tangan Elektronik.

Daftar realisasi kegiatan pengamanan informasi Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel Realisasi Kegiatan Pengamanan Informasi Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023**

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Kontra Penginderaan, Jamming, Monitoring Alat Komunikasi	28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KP Kec. Medan Kota</li> <li>2. KP Kec. Medan Sunggal</li> <li>3. KP Kec. Medan Helvetia</li> <li>4. KP Kec. Medan Denai</li> <li>5. KP Kec. Medan Baru</li> <li>6. KP Kec. Medan Belawan</li> <li>7. KP Kec. Medan Labuhan</li> <li>8. KP Kec. Medan Marelan</li> <li>9. KP Bagian Umum</li> </ol>

			10. KP Kec. Medan Deli 11. KP Kec. Medan Selayang 12. KP Kec. Medan Tuntungan 13. Monitoring Desa Sikeben Tanggal 03 Agustus 2023 14. Monitoring Desa Sikeben Tanggal 22 Agustus 2023 15. Monitoring Desa Sikeben Tanggal 13 September 2023 16. Monitoring Desa Sikeben Tanggal 25 September 2023 17. Monitoring Pemeliharaan HT Tanggal 7 November 2023 18. Monitoring Pemeliharaan HT Tanggal 8 November 2023  19. Monitoring Pemeliharaan HT Tanggal 17 November 2023 20. Monitoring Pemeliharaan HT Tanggal 6 Desember 2023 21. Monitoring Pemeliharaan HT Tanggal 21 Desember 2023 22. Jammer Presiden Tanggal 19 Agustus 2023 23. Jammer Presiden Tanggal 20 Agustus 2023 24. Jammer Presiden Tanggal 24 Agustus 2023 25. Jammer Presiden Tanggal 25 Agustus 2023 26. Jammer Wakil Presiden Tanggal 18 Oktober 2023 27. Jammer Wakil Presiden Tanggal 19 Oktober 2023 28. Jammer Walikota The Hill Hotel Tanggal 11 Desember 2023
2	Tanda Tangan Elektronik	7	1. Lurah Medan Amplas 2. Plt. Direktur Dr.Pirngadi Kota Medan 3. PKPCKTR 4. Kabag SDA Sekretariat Kota Medan 5. Camat Medan Amplas 6. Kepala Bidang Mutasi & Kesejahteraan Pegawai BKPSDM Kota Medan 7. Kabid Pengembangan SDM BKPSDM Kota Medan

Dalam mencapai target dari indikator ini, ada beberapa upaya yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Melaksanakan Monitoring dan pelaporan di bidang keamanan informasi ke masing masing OPD di Pemerintah Kota Medan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BSrE) dalam menerbitkan tanda tangan elektronik.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu masih kurangnya pelatihan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengamanan informasi (Persandian), sehingga

dalam melaksanakan layanan informasi terhadap semua OPD yang terdapat di Pemerintah Kota Medan masih belum maksimal.

Percapaian target ini dapat diperoleh dari **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi** sebesar 100% dengan **kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** melalui 1) **Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan capaian 100%, terkait ketersediaan alat komunikasi yang digunakan dalam menunjang Pola Hubungan Komunikasi Sandi pengamanan informasi Pemerintah Daerah 2) **Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** yang tercapai 100% terkait penyediaan layanan keamanan informasi.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** serta relative *“sudah sesuai”* dengan target kinerja **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Untuk kegiatan kedua adalah **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**, dengan capaian sebesar 100%. Terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan yaitu **Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** ini terealisasi capaian kinerjanya sesuai target yakni 100%. Dimana terlaksana pemeliharaan terhadap 27 perangkat daerah yang terkait langsung dalam penggunaan alat komunikasi sandi.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** serta relative *“sudah sesuai”* dengan target kinerja **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

## **B. Permasalahan dan Solusi**

### **Permasalahan**

Permasalahan dan tantangan dalam mencapai target kinerja:

1. Masih kurangnya koordinasi dengan OPD-OPD tentang perlunya memberikan data secara *continue* sehingga dapat meningkatkan kapasitas SDM.

2. Belum menerapkan manajemen resiko, pengendalian keamanan informasi, manajemen data audit TIK.
3. Terbatasnya pagu anggaran yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
4. Kurangnya Penggunaan Sarana dan Prasarana yang Modern/Canggih dalam mendukung program prioritas Pemerintah Kota Medan
5. Kurangnya Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dalam pengamanan informasi.

### **Solusi**

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi di Pemerintah Kota Medan terkait penyediaan data sektoral.
2. Meningkatkan pengembangan layanan publik yang berbagi pakai dan terintegrasi demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Pemerintah Kota Medan.
3. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Medan telah tersedia untuk dilaksanakan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi secara komprehensif

### **C. Faktor – faktor Pendukung Keberhasilan Mencapai Target Kinerja**

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
3. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan;
4. Keterbukaan informasi melalui layanan publik mengenai sosialisasi kegiatan pemerintah kota kepada masyarakat;

### 3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
	-	-	-

### 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2022

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Realiasi Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Rata-rata Mendekati 100% sedangkan realisasi belanja sebesar 95,55%	Melakukan Perencanaan yang lebih menyeluruh, menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran secara tepat dan melakukan penghematan biaya dengan cara mengurangi biaya yang tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan di dinas	Realisasi kinerja mencapai hampir 100% untuk semua program kegiatan yang dilaksanakan di dinas dengan pencapaian 97,35 % realisasi belanja (penggunaan anggaran di dinas)
2	Memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga Kota Medan untuk mengetahui informasi tentang perkembangan terkini Kota Medan	Menggunakan hampir semua media dan teknik penyampaian layanan informasi yang ada, serta memperbaiki gaya/cara penyampaian informasi sehingga selain dapat menjangkau layanan yang lebih besar juga menimbulkan ketertarikan masyarakat untuk menerima informasi yang disampaikan, dengan cepat dan akurat.	Masyarakat Kota Medan dapat menerima dan menikmati informasi komunikasi publik yang ada di Kota Medan, baik perihal capaian pembangunan, pelaksanaan pembangunan, perkembangan yang ada, informasi pelaksanaan kegiatan, dan layanan-layanan lain yang mungkin dapat dinikmati masyarakat Kota Medan secara khususnya.

		dan akurat.	
3	Mampu berkoordinasi secara optimal dengan OPD lain dalam hal meneruskan laporan maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat dalam website resminya, sehingga dapat segera ditindaklanjuti OPD yang terkait	Mengefisienkan penggunaan aplikasi SPAN LAPOR Kota medan, guna menerima masukan baik kritik, saran, informasi yang disampaikan untuk dapat sesegera mungkin disampaikan kepada OPD untuk menjawab seputar masukan yang diberikan, sehingga masyarakat merasa dihargai, dipedulikan dan dilindungi pemerintah.	Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat tetap terjalin dengan baik, info pelaksanaan kegiatan, pengumuman, layanan dapat cepat tersampaikan dan masukan baik tanggapan, saran, dan kritik atau info lain dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti & diselesaikan, sehingga masyarakat merasa di hargai, dipedulikan dan dilindungi pemerintah.

Medan, Januari 2024



**ARRAHMAAN PANE, S.STP.,M.A.P**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19780730 199612 1 001**